

60 Tahun Republik Indonesia

Gerak Pembangunan di Era Enam Presiden

Sepanjang enam puluh tahun merdeka, Indonesia dipimpin oleh enam presiden, yakni: Soekarno, HM Soeharto, BJ Habibie, KH Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Bagaimana gerak pembangunan dalam setiap masa kepemimpinan keenam presiden itu? Siapa di antara mereka yang paling berjasa membangun Indonesia?

Belajar dari pengalaman kepemimpinan negeri ini, ternyata tidak mudah bagi seorang presiden menggerakkan pembangunan nasional. Pengalaman empiris enam Presiden RI itu menunjukkan tidak semua mereka secara nyata mampu melakukan pembangunan.

Sehingga hampir separoh usia republik ini malah dihabiskan dalam suasana revolusi, pergolakan dan euforia politik. Hanya sekitar 30 tahun bangsa ini berkesempatan berkonsentrasi menggalakkan pembangunan. Ternyata, perjalanan sejarah kepemimpinan bangsa ini menunjukkan bahwa negeri puluhan ribu pulau ini sepatutnya dipimpin seorang pemimpin yang kuat dan bervisi pembangunan.

Pemimpin yang tidak cukup hanya mengandalkan tingginya keahlian akademis atau kepintaran berwacana dan retorika, atau hanya mengandalkan kharisma, popularitas yang menanggung luapan emosi dukungan politik massa. Tetapi seorang pemimpin visioner yang mempunyai keberanian dan kepercayaan diri yang kuat.

Dengan tidak bermaksud meremehkan peran empat presiden di era reformasi ini, bahwa dua presiden terdahulu patut mendapat penghargaan yang setinggi-tingginya dari bangsa ini. Bung Karno sebagai proklamator mewariskan

kemerdekaan dan berdirinya NKRI, kendati pembangunan ekonomi tidak banyak dilakukannya. Pak Harto mewariskan pembangunan ekonomi yang bertumbuh demikian pesat dan makin mengukuhkan NKRI, sehingga mendapat penghargaan sebagai Bapak Pembangunan Indonesia.

Bila menoleh gerak pembangunan dalam 60 tahun usia republik ini, Pak Harto mengukir karya besar pembangunan dibanding lima presiden lainnya. Dia menorehkan peran yang lebih besar di

REFORMASI: Jangankan membangun, kata pembangunan pun sudah semakin jarang diucapkan.

antara pemimpin lainnya, mulai dari Presiden Soekarno, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhono saat ini.

Memang, masing-masing presiden ini menorehkan peran pada masanya. Tapi, jika jujur, haruslah diakui, bahwa Pak Harto-lah yang mengukir karya pembangunan ekonomi terbesar di antara mereka. Bung Karno, memang mempunyai kelebihan tersendiri sebagai proklamator. Sementara para Presiden sesudah Pak Harto beserta

para elit politiknya terjebak dalam euforia reformasi.

Ketika HM Soeharto dengan sukarela mengundurkan diri dari jabatan presiden, ternyata belum ada pemimpin yang mampu mengatasi masalah. Sehingga krisis moneter makin berlanjut menjadi krisis ekonomi dan krisis multidimensional sampai hari ini.

Pada era reformasi ini, justru politisi negarawan semakin langka. Kepentingan kelompok makin menonjol. Bahkan kebhinekaan pun difatwakan haram. Kekerasan mengatasnamakan agama pun makin menonjol. Dasar negara Pancasila pun dipandang tidak perlu. UUD 1945 pun dengan mudahnya mengalami tahap perubahan sampai empat kali. Integrasi bangsa ini terancam retak. Bahkan Timor Timur dilepas. Sipadan dan Ligitan telah dicaplok dan Blok Ambalat tengah diincar Malaysia. Aceh dikuatirkan telah berada di ambang genggaman asing dan GAM. Papua bisa mungkin belajar dari Aceh.

Kemiskinan makin membelenggu. Polio dan berbagai jenis penyakit menular merenggut banyak nyawa. Bahkan busung lapar terjadi di bumi pertiwi. Dan, kelihatannya nyaris tidak ada pola untuk mengatasinya. Jangankan membangun, kata pembangunan pun sudah semakin jarang diucapkan.

Kondisi carut-marut dalam perpolitikan nasional dewasa ini telah mendorong Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB) yang dipimpin Soeprapto menyampaikan pokok-pokok pikiran LPPKB kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

LPPKB menyimpulkan penyebab carut-marutnya kondisi bangsa dewasa ini adalah persoalan moral, etika dan kepatuhan kepada konstitusi. "Kami melihat banyak pelaku politik kurang memahami fatsoen kehidupan politik sehingga menghalalkan semua tindakan," ujar Soeprapto.

Untuk mengatasi dan mencegah hal itu, menurut Soeprapto, perlu ditekankan

kembali landasan utama dalam hidup berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Dalam kondisi seperti ini, nama Pak Harto pantas saja menjadi memiliki makna yang amat berarti dengan strategi Trilogi Pembangunan-nya (stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan).

Jika ditanya masyarakat di pedesaan Nusantara, tak heran bila mereka merindukan pemimpin besar sekaliber Pak Harto. Sosok Bapak Pembangunan Indonesia itu adalah orang terbesar Indonesia saat ini. Sebagai manusia, apalagi sebagai pemimpin yang banyak berbuat, pastilah beliau tidak sempurna dan punya kekurangan dan kelemahan. Tetapi sebagai bangsa besar, sepatutnya bangsa ini menghormati para pejuang dan pemimpin yang mengabdikan diri kepada bangsa dan negaranya.

Sebagaimana diharapkan para sesepuh yang tergabung dalam LPPKB agar masyarakat melihat masa lalu secara jernih, terutama hal-hal baik yang telah dilakukan para pemimpin pendahulu, seperti Presiden Soekarno yang sangat gandrung dengan persatuan dan Presiden Soeharto yang sangat gandrung dengan pembangunan.

Dalam pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (13/6/2005), itu mereka menyatakan mendukung langkah pemerintah melanjutkan hal-hal yang terbukti baik di masa lalu, seperti dikemukakan SBY dalam rapat dengan para gubernur di Jakarta.

Menurut Soeprapto, pengakuan adanya kontinuitas tidak bisa dihindari. "Masa lalu harus dilihat secara jernih dan tidak bisa digeneralisir semuanya buruk-buruk," ujar Ketua LPPKB Soeprapto se usai pertemuan dengan Presiden.

Menurut Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi yang turut mendampingi SBY pada pertemuan lebih dari tiga jam itu, LPPKB meminta agar hal-hal prinsip dalam membangun bangsa ke depan dipertahankan. Hal-hal prinsip itu adalah bagaimana tetap konsisten dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika atau pluralisme.

Berikut ini kami sajikan kilas balik gerak pembangunan dalam era kepemimpinan enam presiden dalam 60 tahun usia Republik Indonesia. **ti/ch robin simanullang**

Pembangunan di Era Bung Karno Gelora Politik **Revolusioner**



Fase pertama pemerintahan Presiden Soekarno (1945-1959) diwarnai semangat revolusioner, serta dipenuhi kemelut politik dan keamanan. Belum genap setahun menganut sistem presidensial sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945, pemerintahan Bung Karno tergelincir ke sistem semi parlementer. Pemerintahan parlementer pertama dan kedua dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Pemerintahan Sjahrir dilanjutkan oleh PM Muhammad Hatta yang merangkap Wakil Presiden.

Kepemimpinan Bung Karno terus menerus berada di bawah tekanan militer Belanda yang ingin mengembalikan penjajahannya, pemberontakan-pemberontakan bersenjata, dan persaingan di antara partai-partai politik.

Sementara pemerintahan parlementer jatuh-bangun. Perekonomian terbengkalai lantaran berlarut-larutnya kemelut politik.

Ironisnya, meskipun menerima sistem parlementer, Bung Karno membiarkan pemerintahan berjalan tanpa parlemen yang

dihasilkan oleh pemilihan umum. Semua anggota DPR (DPGR) dan MPR (MPRS) diangkat oleh presiden dari partai-partai politik yang dibentuk berdasarkan Maklumat Wakil Presiden, tahun 1945.

Demi kebutuhan membentuk Badan Konstituante untuk menyusun konstitusi baru menggantikan UUD 1945, Bung Karno menyetujui penyelenggaraan Pemilu tahun 1955, pemilu pertama dan satu-satunya Pemilu selama pemerintahan Bung Karno. Pemilu tersebut menghasilkan empat besar partai pemenang yakni PNI, Masjumi, NU dan PKI.

Usai Pemilu, Badan Konstituante yang disusun berdasarkan hasil Pemilu, mulai bersidang untuk menyusun UUD baru. Namun sidang-sidang secara marathon selama lima tahun gagal mencapai kesepakatan untuk menetapkan sebuah UUD yang baru.

Menyadari bahwa negara berada di ambang perpecahan, Bung Karno dengan dukungan Angkatan Darat, mengumumkan dekret 5 Juli 1959. Isinya; membubarkan Badan Konstituante dan kembali ke UUD 1945. Sejak 1959 sampai 1966, Bung Karno memerintah dengan dekret, menafikan Pemilu dan mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup.

Pemerintahan parlementer yang berpegang pada UUD Sementara, juga jatuh dan bangun oleh mosi tidak percaya. Akibatnya, kondisi ekonomi morat-marit. Sementara itu, para pemimpin Masjumi dan PSI terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta. Kemudian, Bung Karno membubarkan kedua partai tersebut.

Pada fase kedua kepemimpinannya, 1959-1967, Bung Karno menerapkan demokrasi terpimpin. Semua anggota DPRGR dan MPRS diangkat untuk mendukung program pemerintahannya yang lebih fokus pada bidang politik. Bung Karno berusaha keras menggiring partai-partai politik ke dalam ideologisasi NASAKOM— Nasional, Agama dan Komunis. Tiga pilar utama partai politik yang mewakili

NASAKOM adalah PNI, NU dan PKI. Bung Karno menggelorakan Manifesto Politik USDEK. Dia menggalang dukungan dari semua kekuatan NASAKOM.

Namun di tengah tingginya persaingan politik Nasakom itu, pada tahun 1963, bangsa ini berhasil membebaskan Irian Barat dari cengkraman Belanda. Saat itu yang menjadi Panglima Komando Mandala (pembebasan Irija) adalah Mayjen Soeharto.

Tahun 1964-1965, Bung Karno kembali menggelorakan semangat revolusioner bangsanya ke dalam peperangan (konfrontasi) melawan Federasi Malaysia yang didukung Inggris.

Sementara, dalam kondisi itu, tersiar kabar tentang sakitnya Bung Karno. Situasi semakin runyam tatkala PKI melancarkan Gerakan 30 September 1965. Tragedi pembunuhan tujuh jenderal Angkatan Darat



tersebut menimbulkan situasi *chaos* di seluruh negeri. Kondisi politik dan keamanan hampir tak terkendali.

Menyadari kondisi tersebut, Bung Karno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 kepada Jenderal Soeharto. Ia mengangkat Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang bertugas mengembalikan keamanan dan ketertiban. Langkah

penertiban pertama yang dilakukan Pak Harto, sejalan dengan tuntutan rakyat ketika itu, membubarkan PKI. *(Selengkapnya baca: Pak Harto Terkait G-30-S/ PKI?)*

Bung Karno, setelah tragedi berdarah tersebut, dimintai pertanggungjawaban di dalam sidang istimewa MPRS tahun 1967. Pidato pertanggungjawaban Bung Karno ditolak. Kemudian Pak Harto

diangkat selaku Pejabat Presiden. Pak Harto dikukuhkan oleh MPRS menjadi Presiden RI yang Kedua, Maret 1968.

Sementara pembangunan ekonomi, selama 22 tahun Indonesia merdeka, praktis dikesampingkan. Walaupun ada, pembangunan ekonomi dilaksanakan secara sporadis, tanpa panduan APBN. Pembangunan dilakukan hanya dengan mengandalkan dana pampasan perang Jepang.

Dari dana pampasan perang itu, Bung Karno membiayai pembangunan fisik, antara lain, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, Gedung Sarinah, Stadion Senayan, Bendungan Jatiluhur, Hotel Samudra Beach, Hotel Ambarukmo Yogyakarta, Bali Beach dan Sanur Beach di Bali.

Juga memulai membangun Gedung MPR/DPR, Tugu Monas dan Masjid Agung Istiqlal yang kemudian dirampungkan dalam era pemerintahan Pak Harto. Emas murni di pucuk Monas yang tadinya disebut 35 kilogram ternyata hanya 3 kilogram, kemudian disempurnakan pada era pemerintahan Orde Baru. □ ti/crs/sh

Bung Karno Putra Sang Fajar

"Aku adalah putra seorang ibu Bali dari kasta Brahmana. Ibuku, Idaju, berasal dari kasta tinggi. Raja terakhir Singaraja adalah paman ibuku. Bapakku dari Jawa. Nama lengkapnya adalah Raden Sukemi Sosrodihardjo. Raden adalah gelar bangsawan yang berarti, Tuan. Bapak adalah keturunan Sultan Kediri... Apakah itu kebetulan atau suatu pertanda bahwa aku dilahirkan dalam kelas yang memerintah, akan tetapi apa pun kelahiranku atau suratan takdir, pengabdian bagi kemerdekaan rakyatku bukan suatu keputusan tiba-tiba. Akulah ahli-warisnya." Ir. Soekarno menuturkan kepada penulis otobiografinya, Cindy Adam.

Putra sang fajar yang lahir di Blitar, 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Soekemi dan Ida Ayu Nyoman Rai, diberi nama kecil, Koesno. Ir. Soekarno, 44 tahun kemudian, mengukir fajar kemerdekaan Indonesia setelah lebih dari tiga setengah abad ditindas oleh penjajah-penjajah asing.

Soekarno hidup jauh dari orang tuanya di Blitar sejak duduk di bangku sekolah rakyat, indeksos di Surabaya sampai tamat HBS (Hoogere Burger School). Ia tinggal di rumah Haji Oemar Said Tjokroaminoto, politisi kawakan pendiri Syarikat Islam. Jiwa nasionalismenya membara lantaran sering menguping diskusi-diskusi politik di rumah induk semangnya yang kemudian menjadi ayah mertuanya dengan menikahi Siti Oetari (1921).

Soekarno pindah ke Bandung, melanjutkan pendidikan tinggi di THS (Technische Hooge-School), Sekolah Teknik Tinggi yang kemudian hari menjadi ITB, meraih gelar insinyur, 25 Mei 1926. Semasa kuliah di Bandung, Soekarno, menemukan jodoh yang lain, menikah dengan Gnggit Ganarsih (1923).

Soekarno muda, lebih akrab dipanggil Bung Karno mendirikan PNI (Partai Nasional Indonesia), 4 Juni 1927. Tujuannya, mendirikan negara Indonesia Merdeka. Akibatnya, Bung Karno ditangkap, diadili dan dijatuhi hukuman penjara oleh pemerintah Hindia Belanda. Ia dijabolaskan ke

penjara Sukamiskin, Bandung, 29 Desember 1949. Di dalam pidato pembelaannya yang berjudul, Indonesia Menggugat, Bung Karno berapi-api menelanjangi kebobrokan penjajah Belanda.

Bebas tahun 1931, Bung Karno kemudian memimpin Partindo. Tahun 1933, Belanda menangkapnya kembali, dibuang ke Ende, Flores. Dari Ende, dibuang ke Bengkulu selama empat tahun. Di sanalah ia menikahi Fatwamati (1943) yang memberinya lima orang anak: Guntur Soekarnoputra, Megawati Soekarnoputri, Rahmawati, Sukmawati dan Guruh Soekarnoputri.

Soekarno adalah seorang cendekiawan yang meninggalkan ratusan karya tulis dan beberapa naskah drama yang mungkin hanya pernah dipentaskan di Ende, Flores. Kumpulan tulisannya sudah diterbitkan dengan judul Dibawah Bendera Revolusi, dua jilid. Dari buku setebal kira-kira 630 halaman tersebut, tulisan pertamanya (1926), berjudul, Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme, bagian paling menarik untuk memahami gelora muda Bung Karno.

Tahun 1942, tentara pendudukan Belanda di Indonesia menyerah pada Jepang. Penindasan yang dilakukan tentara pendudukan selama tiga tahun jauh lebih kejam. Di balik itu, Jepang sendiri sudah mengimangi kemerdekaan bagi

Indonesia. Penyerahan diri Jepang setelah dua kota utamanya, Nagasaki dan Hiroshima, dibom atom oleh tentara Sekutu, tanggal 6 Agustus 1945, membuka cakrawala baru bagi para pejuang Indonesia. Mereka, tidak perlu menunggu, tetapi merebut kemerdekaan dari Jepang.

Setelah persiapan yang cukup panjang, dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Drs Muhammad Hatta, mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur No. 52 (sekarang Jln. Proklamasi), Jakarta. □ ti/crs/sh